

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana prosedur penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi serta hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan dan Verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi adalah :
  - a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - d. Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah;
  - e. Perumusan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
  - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Dalam proses verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi. Adapun tahapan yang dilakukan adalah :
  - a. Verifikasi Renja OPD Tahap 1, yaitu dilakukannya persandingan antara RPJMD, RENSTRA, dan Renja OPD;

- b. Verifikasi ulang Tahap 2 atas program dan kegiatan yang telah disesuaikan pada verifikasi tahap 1 melalui sistem E-Planning (Sakato Plan); dan
  - c. Verifikasi ulang Tahap 3, dengan sistem E-Planning (Sakato Palan), tujuan untuk memastikan apakah kegiatan dan program Kab/Kota sudah sesuai dengan OPD Provinsi.
3. Hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.

Berikut ini 4 (empat) faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan :

1. Belum tercapainya fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Kurangnya partisipasi keikutsertaan Perangkat Daerah dalam proses verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi
3. Belum terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; dan
4. Belum terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bappeda terhadap kinerja pegawai sehingga kegiatan perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

## 5.2 Saran

Adapun saran dari penulis yaitu dalam proses penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian target kinerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati.